

# MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA

**H. HUSNI TAMRIN**

Prinsip dan Bentuk Perjanjian Serta Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

**I WAYAN GDE WIRYAWAN**

Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

**I NYOMAN PUTU BUDIARTHA**

Pengaturan Bentuk Organisasi, Merger dan Akuisisi Perusahaan

**I GEDE PASEK EKA WISANJAYA**

Pemenuhan Hak Ekonomi Dalam Bidang Hak Atas Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja

**DESAK GEDE DWIARINI DAN ISNI RUBIANTINI**

Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Bidang Jasa Perdagangan Ekspor

**HENDRIK SALMON**

Membangun Legislasi Daerah Yang Partisipatif

**SURIANSYAH MURHAINI**

Jaminan Konstitusional Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Indonesia

**W.M HERRY SUSILOWATI**

Analisis Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

**SUDINI, LUH PUTU**

Akibat Hukum Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dalam Hubungan Internasional

**I KETUT KARTA ARYA WIJAYA DAN NI MADE PUSPASUTARI UJANTI**

Subak Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia

**STEVANUS EVAN SETIO**

Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

**IMADE SEPUD**

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia

**I NYOMAN NGURAH SUWARNATHA**

Kewenangan KPK VS Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi

**IMADE WIRYADARMA**

Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam KUHP Indonesia



# **MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA**

**ISSN 0853-6422**

**PENANGGUNGJAWAB :**

Ni Luh Made Mahendrawati

**DEWAN EDITOR :**

I Gusti Bagus Suryawan ( Ketua)  
Ni Made Puspasutari Ujianti (Sekretaris).  
Luh Putu Suryani ( Bendahara)  
Ni Komang Arini Styawati ( Anggota)  
AA Sagung Laksmi Dewi ( Anggota)  
Diah Gayatri Sudibya ( Anggota)  
I Wayan Arthanaya ( Anggota)  
Isni Rubiantini ( Anggota )

**TATA USAHA :**

Ni Made Suri Adnyani  
I Wayan Sumerta  
I Nyoman Kesumajaya  
Ni Nyoman Suwirti  
I Nyoman Suidiana Putra  
I Gusti Ayu Karuni

**SEKRETARIAT :**

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar  
Jl. Terompong No. 24 Tanjung Bungkak Denpasar (80235)  
Telp (0361) 223858 (hunting), 7449633, Fax (0361) 263902  
E-mail : kerthawicaksana@yahoo.co.id

**MAJALAH ILMU HUKUM KERTHA WICAKSANA**

diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar  
bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bali  
dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Denpasar sebagai Media Informasi  
dan Pengembangan Ilmu Hukum, yang diterbitkan dua kali setahun  
yaitu setiap bulan Januari dan Juli.

Berdasarkan KeputusanDirektur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan  
Nasional Nomor : 64a/DIKTI/Kep./2010, Majalah Ilmu Hukum Kertha Wicaksana  
dinyatakan terakreditasi sebagai Jurnal Ilmiah Nasional



# DAFTAR ISI

EDITORIAL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>HUKUM BISNIS DAN KENOTARIATAN</b>	
<b>H. HUSNI TAMRIN</b>	
Prinsip dan Bentuk Perjanjian Serta Kegiatan Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia .....	134
<b>I WAYAN GDE WIRYAWAN</b>	
Perlindungan Hak Konstitusional Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia ( Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). .....	141
<b>I NYOMAN PUTU BUDIARTHA</b>	
Pengaturan Bentuk Organisasi, Merger dan Akuisisi Perusahaan .....	151
<b>I GEDE PASEK EKA WISANJAYA</b>	
Pemenuhan Hak Ekonomi Dalam Bidang Hak Atas Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja .....	161
<b>DESAK GEDE DWI ARINI DAN ISNI RUBIANTINI</b>	
Pengaturan Penanaman Modal Asing Di Bidang Jasa Perdagangan Ekspor .....	168
<b>HUKUM PEMERINTAHAN</b>	
<b>HENDRIK SALMON</b>	
Membangun Legislasi Daerah Yang Partisipatif .....	173
<b>SURIANSYAH MURHAINI</b>	
Jaminan Konstitusional Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat Di Indonesia .....	186
<b>W.M HERRY SUSILOWATI</b>	
Analisis Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Lembaga Negara penunjang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	194
<b>SUDINI, LUH PUTU</b>	
Akibat Hukum Perjanjian Ekstradisi Indonesia Dalam Hubungan Internasional .....	203
<b>I KETUT KARTA ARYA WIJAYA DAN NI MADE PUSPASUTARI UJIANTI</b>	
Subak Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia .....	215
<b>STEVANUS EVAN SETIO</b>	
Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	220
<b>HUKUM KEPENGACARAAN</b>	
<b>I MADE SEPUD</b>	
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia .....	226
<b>I NYOMAN NGURAH SUWARNATHA</b>	
Kewenangan KPK VS Kepolisian Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi .....	235
<b>I MADE WIRYA DARMA</b>	
Kebijakan Formulasi Norma Pencurian Benda-Benda Sakral Dalam KUHP Indonesia .....	242
INDEKS PENULIS .....	248
INDEKS SUBJEK .....	249
UCAPAN TERIMAKASIH .....	250
DAFTAR KEGIATAN ILMIAH .....	251
PETUNJUK PENULISAN .....	252



# AKIBAT HUKUM PERJANJIAN EKSTRADISI INDONESIA DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL

(INDONESIAN LEGAL CONSEQUENCES EXTRADITION TREATY  
IN INTERNATIONAL RELATIONS)

Luh Putu Sudini

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa  
Jln. Terompong No. 24 Tanjung Bungak  
HP. 08123973355  
sudini\_putu@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Suatu perjanjian ekstradisi bagi masyarakat internasional menimbulkan dampak positif juga membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya tindak pidana yang tidak hanya berskala nasional, tetapi juga transnasional serta global dengan modul operandi yang semakin canggih sehingga menyebabkan para pelaku kejahatan dengan cepat ingin mendapat keuntungan dengan melarikan diri keluar dari negara mereka dengan menggunakan fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang canggih untuk menghindari penuntutan dan pemidanaan. permasalahan 1. bagaimanakah akibat hukum perjanjian ekstradisi di Indonesia dalam hubungan internasional? dan 2. bagaimanakah prosedur pelaksanaan ekstradisi di Indonesia?

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif, melalui penelitian kepustakaan (*library research*) berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, diolah analisa melalui kualitatif dan dituangkan secara deskriptif.

Dengan tumbuhnya Negara-negara nasional, hubungan pergaulan internasional mulai mencari dan menemukan bentuk baru. Negara-negara dalam membuat perjanjian sudah mulai mengadakan pengkhususan seperti perjanjian ekstradisi. Menyadari akan hal ini maka Negara Republik Indonesia mengadakan kerjasama bilateral antar Negara dengan mengadakan perjanjian ekstradisi diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1979. Undang-undang mencakup tentang prosedur pelaksanaan ekstradisi dan pemeriksaan terhadap orang yang akan diekstradisi. Sebelum diekstradisi terlebih dahulu orang tersebut diperiksa di Pengadilan Negeri. Dari hasil analisis dapat diketahui akibat hukum perjanjian ekstradisi di Indonesia dalam hubungan internasional adalah Pemerintah Republik Indonesia bersepakat untuk saling menyerahkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian ekstradisi tersebut.

**Kata Kunci:** Akibat Hukum, Perjanjian Ekstradisi, Hubungan Internasional

## ABSTRACT

An extradition treaty for the international community a positive impact also have negative impacts on human life. One of the negative impacts is the increasing crime that not only national, but also transnational and global operandi that increasingly sophisticated module that causes the perpetrators quickly to profit by escaping out of their country by using transport facilities and sophisticated communication to avoid prosecution and conviction. issue 1. how the legal consequences extradition treaty in Indonesia in international relations? and 2. how does the implementation of extradition procedures in Indonesia?

The research method used is a normative legal research methods, through literature research (library research) in the form of primary legal materials and secondary legal materials, processed through a qualitative analysis and descriptive poured.

With the growth of national states, international association relationship started looking and found a new form. Countries in making agreements already entered into such specialization extradition treaty. Would realize this then the Republic of Indonesia held a bilateral cooperation between countries with extradition treaties entered into stipulated in Act 1 1979. Legislation includes the implementation of extradition procedures and examination of persons who will be extradited. Before being extradited advance is examined in the District Court. From the analysis it can be seen due to the law of extradition treaties in international relations in Indonesia is the Indonesian Government agreed to surrender to each other, in accordance with the terms and conditions set forth in the extradition agreement.

**Keywords:** Because Law, Extradition Treaty, International Relations



## PENDAHULUAN

Era globalisasi masyarakat internasional dewasa ini didukung oleh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, timbulnya kejahatan-kejahatan yang berdimensi internasional ini akan semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Mengingat hukum internasional dalam kebanyakan hal, adalah hukum yang memberikan sarana bagi negara-negara sebagai pelaku hukum untuk menampung aspirasi dan untuk mewujudkan kepentingan dari Negara-negara dengan cara bekerja sama dan saling menguntungkan, yang dimuat dalam berbagai perjanjian bilateral maupun multilateral yang mencakup banyak masalah dan diselesaikan secara *consensus*. (Melda Kamil Ariondo, 2007:7).

Negara-negara di dunia memiliki tata hukum atau hukum positif untuk memelihara dan mempertahankan keamanan, baik dalam tingkat kehidupan antar wilayah dalam suatu negara, juga berpengaruh terhadap instabilitas keamanan wilayah regional dan internasional. Pelanggaran atas tata hukumnya dikenakan sanksi sebagai upaya pemaksa agar hukum tetap dapat ditegakkan, (I Wayan Parthiana, 1990: 9) sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Bagi pelanggar harus mempertanggung jawabkan kejahatan yang telah dilakukannya, bila terbukti bersalah dia akan dijatuhi hukuman setimpal dengan pelanggaran yang dibuatnya.

Dalam kondisi instabilitas tersebut ditandai dengan terjadinya tindak pidana bersifat transnasional. Tindak Pidana Transnasional adalah Kejahatan yang bersifat lintas negara atau melampaui batas-batas wilayah negara, baik mengenai tempat terjadinya, akibat-akibat yang ditimbulkannya, maupun tujuan kejahatan itu sendiri, dan/atau dimungkinkan pelakunya juga dapat melibatkan individu-individu dari berbagai negara. Yang dimana dalam tindak pidana transnasional terdapat unsur asing dalam perbuatan pidana yang terjadi, yang melewati batas teritorial antar negara. Sehingga dalam setiap negara kejahatan yang bersifat transnasional memberikan dampak yang negatif. Adapun Ciri-ciri Tindak Pidana Transnasional antara lain (<http://hukum012.blogspot.com/2009/10/hukum-pidana-transnasional.html>): 1. Menimbulkan ancaman baik secara langsung maupun tidak

langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia; 2. Memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara; 3. Merupakan suatu tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara; 4. Sarana-prasarana dan metode yang dipergunakan telah melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Berdasarkan asas hukum dalam internasional, setiap negara memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan atas orang dan benda yang ada di dalam wilayah sendiri. (Arthur Nussabaum, 1969; 142-143). Oleh karena itu suatu negara dilarang untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat pelaksanaan kedaulatan terhadap negara lain kecuali dengan persetujuan negara itu sendiri. Sebab tindakan tersebut dipandang sebagai intervensi atas masalah-masalah di dalam negara lain.

Dalam hubungan dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke wilayah negara lain maka negara yang menderita akibat kejahatan tersebut tidak boleh melakukan penangkapan dan penahanan secara langsung di dalam wilayah negara tempat si pelaku melarikan diri. Oleh karena itu yang memiliki yurisdiksi terhadap si pelaku kejahatan itu tidak bisa menangkap secara langsung di wilayah negara tempat si pelaku kejahatan itu berada, negara-negara tersebut dapat menempuh cara yang legal untuk dapat mengadili dan menghukum si pelaku kejahatan tersebut. Negara-negara yang memiliki yurisdiksi dapat meminta kepada negara tempat si pelaku kejahatan itu berada supaya menangkap dan menyerahkan orang tersebut. Sedangkan negara tempat si pelaku kejahatan itu berada setelah menerima permintaan itu berhak untuk menolak dan menyerahkan si pelaku kejahatan. Cara atau prosedur yang tersebut di atas telah diakui dan merupakan prosedur yang telah dianut baik dalam hukum nasional maupun internasional dan dikenal dengan nama ekstradisi.

Seperti awal diketahui bahwa ekstradisi sebenarnya pertama tama merupakan masalah antar negara dan oleh karena itu pengaturannya terdapat dalam hukum internasional. Di samping itu juga masalah ekstradisi merupakan masalah domestik negara-negara dan oleh karenanya diatur di dalam hukum nasional, khususnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang ekstradisi yang dimana ekstradisi sebagai suatu pranata hukum yang secara resmi diakui dan diatur dalam hukum internasional maupun hukum nasional.



Mengingat dan mengetahui peran dan manfaat pentingnya ekstradisi dalam hubungan internasional, guna kelancaran dan ketertiban kehidupan masyarakat internasional. Permasalahan :1. Bagaimanakah akibat hukum perjanjian ekstradisi Indonesia dalam hubungan internasional ? dan Bagaimanakah prosedur pelaksanaan ekstradisi di Indonesia?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*. Artinya pengkajian didasarkan pada pendekatan perundang-undangan, literatur-literatur dan kamus-kamus atau dengan kata lain pengkajian berpedoman kepada kaidah-kaidah hukum, khususnya ketentuan undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi maupun ketentuan hukum internasional berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*), selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diolah dan dianalisa secara argumentasi hukum dan disajikan secara *deskriptif analisis* yaitu suatu tinjauan yang memberikan gambaran secara umum tentang permasalahan kemudian dianalisa dan dituangkan dalam bentuk deskriptif, yaitu melalui pemaparan dalam bentuk uraian, sehingga diperoleh suatu simpulan yang logis dan ilmiah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Tujuan Penelitian : a. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian ekstradisi yang ada dalam hubungan internasional. dan b. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian ekstradisi Indonesia dalam hubungan internasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN.

### Perkembangan Sejarah Ekstradisi

Lembaga ekstradisi telah diakui dan diterima oleh para sarjana hukum internasional sebagai hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Hal ini memang bisa dipahami karena lembaga ekstradisi ini sudah berumur cukup lama. (I Wayan Parthiana, 2004:28).

Maka perkembangan ekstradisi tidak lepas dari sejarah timbulnya ekstradisi dalam hukum Internasional dan hukum Nasional. Para penulis sejarah hukum Internasional mengemukakan bahwa sebuah perjanjian yang tertua dimana isinya juga mengenai masalah penyerahan

penjahat pelarian adalah perjanjian perdamaian antara Raja Ramses II dan Mesir dengan Hattusili dan Kheta yang dibuat pada tahun 1276 SM. Kedua pihak saling berjanji akan menyerahkan pelaku kejahatan yang melarikan diri atau yang diketemukan di dalam wilayah pihak lain. (Arthur Nussabaum, 1969:3)

Dalam perjanjian semacam itu tentulah tidak merupakan perjanjian ekstradisi yang berdiri sendiri seperti yang kita kenal selama ini, melainkan soal ekstradisi ini hanyalah sebagian kecil saja dari keseluruhan materi perjanjian.

Biasanya perjanjian ini merupakan perjanjian perdamaian untuk menjalin hubungan bersahabat antara pihak-pihak atau perjanjian perdamaian untuk mengakhiri peperangan. Kemungkinan jauh sebelumnya terdapat negara-negara yang saling menyerahkan penjahat pelarian meskipun antara kedua pihak belum mengadakan perjanjian. Hubungan baik dan bersahabat antara kedua negara, dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian.

Dengan demikian kesediaan untuk menyerahkan penjahat pelarian bukanlah merupakan atau didasarkan pada kesadaran bahwa orang yang bersangkutan patut diadili dan dihukum. Demikian pula memberikan perlindungan kepada seseorang atau beberapa bahwa orang yang bersangkutan patut untuk dilindungi. Di samping itu praktek penyerahan penjahat pelarian belum didasarkan atas keinginan untuk bekerja sama dalam memecahkan dan memberantas kejahatan. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat pada jaman kuno masih jauh lebih sederhana dibandingkan dengan masyarakat dalam masa tiga abad ke belakang ini.

Tindakan kejahatan serta akibat-akibat yang timbul tidak hanya menjadi urusan para korban dan kelompok masyarakat sekitar saja, akan tetapi sering melibatkan negara-negara. Sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya, diperlukan kerjasama antar negara. Yang dimana dengan menangkap si pelaku kejahatan yang melarikan diri dan menyerahkannya kepada negara yang memiliki yuridiksi untuk mengadili dan menghukumnya, atas permintaannya dari negara tersebut. Sehingga kini telah dibuatkannya suatu wadah yang dimana ditetapkan dalam suatu perjanjian yaitu perjanjian ekstradisi.

Dalam proses ekstradisi di dalam perkembangannya tidak bisa menjamin untuk



dapat diserahkan seseorang pelaku kejahatan di dalam ekstradisi. Hal ini dikarenakan pada hukum internasional tidak ada kewajiban untuk menyerahkan, juga tidak ada kewajiban untuk tidak menyerahkan. Dengan alasan ini, beberapa penulis menyebutkan ekstradisi sebagai "kewajiban tidak sempurna". Dengan tiadanya traktat dengan undang-undang, maka pemberian ekstradisi tergantung hanya pada resiprositas (*reciprocity*) atau kebaikan (*courtesy*). (Strake, 1984;36-37). Dengan mempertimbangkan kelemahan-kelemahan tersebut sehingga dalam perkembangan diusahakan untuk mengadakan peraturan-peraturan tertulis walaupun hanya dilakukan dengan traktat bilateral.

Di Indonesia perkembangan ekstradisi telah ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1979 dengan TLNRI Nomor 3130, yang dinyatakan mulai berlaku tanggal 18 Januari 1979, undang-undang ini merupakan hasil produk badan legislatif pemerintahan Indonesia, yang dimana sebelumnya berlaku *koninklijk nesluit van 8 Mei 1883 tentang uitlevering van vreemdelingen*. Peraturan perundang-undangan tersebut bukanlah bersifat organik, tetapi hanya merupakan penyesuaian dan aplikasi dari undang-undang di negeri Belanda yang mengatur wewenang penyerahan, agar dapat dipergunakan di Hindia Belanda saat itu. (Budiarto, 1981;5).

### Pengertian Ekstradisi

Ekstradisi berasal dari bahasa latin yaitu *extradere* (sebagai kata kerja), atau *extradition* (sebagai kata benda). Kata tersebut terdiri dari kata "ex" yang artinya "keluar" dan "tredere" yang artinya memberikan dan menyerahkan. Ekstradisi adalah penyerahan seorang buronan atau tahanan dari suatu wilayah, negara atau pemerintahan ke wilayah negara atau pemerintahan lainnya. (The Pocket Macqurie Dictaurus, 1991;169). Dalam sejarah hubungan antar bangsa-bangsa, ekstradisi diakui sebagai suatu mekanisme dalam mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan transnasional.

Para sarjana Hukum Internasional memberikan definisi ekstradisi antara lain adalah :

1. L. Oppenheim menyatakan "*Extradition is the delivery of an accused or convicted individual to the state on whose territoire*

*he is alleged to have committed, or the have been convicted of, a crime by the state on whose territory the alleged criminal havens for the time to be.*" (Oppenheim, 1995;340). Yang artinya adalah ekstradisi adalah penyerahan seorang tertuduh oleh suatu negara di wilayah mana ia suatu waktu berada, kepada negara dimana ia disangka melakukan atau telah melakukan atau telah dihukum karena perbuatan kejahatan.

2. J.G. Starke menyatakan "*The term extradition denotes the process where by under or upon a basis of reciprocity on state iarequest a person accused or convicted against the law the requesting state competent to try alleged offender.*" Yang artinya penyerahan ekstradisi menunjukkan suatu proses dimana suatu negara menyerahkan atas permintaan negara lainnya, seorang dituduh karena kriminal yang dilakukannya terhadap undang-undang negara pemohon yang berwenang untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut.
3. Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1979, Pasal 1 Menyatakan :  
"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya." (Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi).

Ekstradisi dapat diartikan sebagai penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan atas perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya, ataupun berdasarkan prinsip timbal balik atau hubungan baik, atau seorang yang dituduh melakukan kejahatan (tersangka, terdakwa, tertuduh) atau seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan yang mengikat pasti (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya berada (negara yang diminta) kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya (negara yang meminta) atas permintaan negara peminta, dengan tujuan untuk mengadili dan atau pelaksanaan hukumnya.



Maksud dan tujuan ekstradisi adalah untuk menjamin agar pelaku kejahatan tidak dapat menghindari dari penuntutan atau pemidanaan. Karena sering kali suatu Negara yang wilayahnya dijadikan tempat berlindung oleh seorang penjahat tidak dapat menuntut atau menjatuhkan pidana kepadanya semata-mata disebabkan oleh beberapa atauran teknis hukum pidana atau karena tidak adanya yuridiksi atas kejahatan tersebut. (M. Budiarto, 1980;13).

### Asas-asas Ekstradisi

Suatu ekstradisi bisa dilakukan baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang sudah ada sebelumnya atau juga bisa dilakukan berdasarkan asas timbal balik apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak.

Dalam hal ini praktek negara-negara berbeda-beda, ada negara-negara yang bersedia menyerahkan orang yang diminta walaupun sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara dan ada negara-negara yang tidak bersedia menyerahkan orang yang diminta apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua pihak.

Ada beberapa asas pokok yang harus ditaati dan selalu dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian ekstradisi serta ditaati oleh para pihak dalam setiap kasus yang menyangkut ekstradisi yaitu:

Asas-asas pokok ekstradisi tersebut adalah :

a. Azas kejahatan ganda (*double criminality principle*);

Menurut asas ini, kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, haruslah merupakan kejahatan (tindak pidana) baik menurut hukum negara-peminta maupun hukum negara-diminta. Hal ini tidak perlu nama ataupun unturnya sama, mengingat sistem hukum masing-masing negara yang berbeda-beda. Sudah cukup jika hukum kedua negara sama-sama mengklasifikasikan kejahatan itu sebagai kejahatan atau tindak pidana. (Subagio, 1979;45).

b. Azas kekhususan (*principle of speciality*);

Apabila orang yang diminta telah diserahkan, negara-peminta hanya boleh mengadili dan atau menghukum orang yang diminta, hanyalah berdasarkan pada kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisinya. Jadi dia tidak boleh diadili dan atau dihukum atas kejahatan lain, selain daripada kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisinya.

c. Azas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik (*non-extradition of political criminal*);

Jika negara-diminta berpendapat, bahwa kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi oleh negara-peminta tergolong sebagai kejahatan politik, maka negara-diminta harus menolak permintaan tersebut. Karena sulit untuk menentukan kriteria objektif tentang kejahatan politik, maka negara-negara baik dalam perjanjian ataupun dalam perundang-undangan ekstradisinya, menggunakan sistem negatif, yaitu dengan menyatakan secara tegas bahwa kejahatan-kejahatan tertentu dinyatakan bukan sebagai kejahatan politik, atau dinyatakan sebagai kejahatan yang dapat dijadikan alasan meminta maupun mengekstradisikan orang yang diminta (*extraditable crime*).

d. Azas tidak menyerahkan warga negara (*non-extradition of nationals*);

Jika orang yang diminta ternyata adalah warga negara dari negara-diminta, maka negara-diminta dapat menolak permintaan dari negara-peminta. Azas ini berlandaskan pada pemikiran, bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya, dan warga negara memang berhak untuk memperoleh perlindungan dari negaranya. Jika negara-diminta menolak permintaan negara peminta, negara diminta berkewajiban untuk mengadili dan atau menghukum warga negaranya tersebut berdasarkan hukum nasionalnya.

e. Azas *non bis in idem*;

Menurut asas ini, jika kejahatan yang dijadikan alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, ternyata sudah diadili dan atau dijatuhi hukuman yang telah memiliki kekuatan mengikat yang pasti, maka permintaan negara peminta harus ditolak oleh negara diminta.

f. Azas daluwarsa;

Permintaan negara-peminta harus ditolak apabila penuntutan atau pelaksanaan hukuman terhadap kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk meminta ekstradisi atas orang yang diminta, sudah daluwarsa menurut hukum dari salah satu atau kedua belah pihak.

### Syarat-syarat Ekstradisi dan Proses Penanganan Ekstradisi

Sebelum dibuat suatu permintaan ekstradisi melalui saluran diplomatik, sebagai peraturan harus dipenuhi dua syarat yaitu :



- a. Harus ada orang yang diekstradisi : Dalam hal ini adanya suatu keseragaman praktek negara, sehingga negara yang meminta bisa mendapat penyerahan warga negaranya sendiri atau warga negara dari negara ketiga. Tetapi kebanyakan negara biasanya menolak ekstradisi warga mereka sendiri yang mencari tempat perlindungan di wilayah mereka, akan tetapi ada juga permintaan untuk meyerahkan dikabulkan.
- b. Harus ada kejahatan ekstradisi: Pada umumnya Negara-negara mengekstradisi hanya untuk kejahatan-kejahatan berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, perbudakan, penipuan, penyelundupan. Praktek akhir-akhir ini menunjukkan suatu kecenderungan umum dari Negara-negara untuk memperlakukan "kejahatan perang" sebagai kejahatan ekstradisi. Tetapi ada sejumlah keputusan pengadilan nasional yang memberlakukan kejahatan perang sebagai suatu pelanggaran politik untuk tujuan ekstradisi sehingga suatu permintaan ekstradisi ditolak.

Berdasarkan kedua syarat tersebut di atas dapat terlihat mengenai proses penanganan suatu ekstradisi antara lain : Setiap orang yang dimintakan untuk diekstradisi kepada negara peminta harus melalui serangkaian tahapan pemeriksaan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Polisi : Pihak kepolisian RI dapat melakukan pemeriksaan dan penahanan terhadap orang yang dimintakan ekstradisi, apabila kejahatan yang telah dilakukannya merupakan kejahatan yang dapat dikenakan penahanan menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang disebut dalam pasal 19 ayat (2), dan (3) dan diajukan permintaan penahanan oleh negara peminta, maka orang tersebut dapat dikenakan penahanan. Penahanan yang diperintahkan berdasarkan pasal 25 UU No. 1 Tahun 1979 dicabut jika :

- a. Diperintahkan oleh pengadilan;
- b. Sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari, kecuali jika diperpanjang oleh pengadilan atas permintaan jaksa;
- c. Permintaan ekstradisi ditolak oleh Presiden.

Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam pasal 34 UU No.1 Tahun 1979 huruf b setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga

puluh) hari. Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal :

- a. Belum adanya penetapan Pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
- b. Diperlukan keterangan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);
- c. Ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya;
- d. Permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan.

## 2. Pelimpahan oleh Kejaksaan

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara tersebut dari Kepolisian, Kejaksaan dengan mengemukakan alasannya secara tertulis, meminta kepada Pengadilan Negeri tempat ditahannya orang itu untuk memeriksa dan kemudian menetapkan dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisikan. Perkara-perkara ekstradisi termasuk perkara-perkara yang didahulukan. Kejaksaan menyampaikan surat panggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap Pengadilan pada hari sidang dan surat panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum hari sidang.

- a. Pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri dilakukan dalam sidang terbuka, kecuali apabila Hakim Ketua Sidang menganggap perlu sidang dilakukan tertutup.
- b. Jaksa menghadiri sidang dan memberikan pendapatnya.
3. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Pemeriksaan perkara ekstradisi di pengadilan negeri tidak memeriksa materi atau pokok perkara, namun pemeriksaan hanya meliputi :

- a. Identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisi itu sesuai dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Negara peminta;
- b. Kejahatan yang dimaksud merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan menurut pasal 4 dan bukan merupakan kejahatan politik atau kejahatan militer;
- c. Hak penuntutan atau hak melaksanakan putusan pengadilan sudah atau belum kadaluwarsa;
- d. Terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan telah atau belum dijatuhkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;



- e. Kejahatan tersebut diancam dengan pidana mati di negara peminta sedangkan di Indonesia tidak;
- f. Orang yang sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.

#### 4. Penetapan dan Tindak Lanjut

Setelah adanya proses pemeriksaan pada pengadilan negeri, maka perkara ekstradisi akan berlanjut pada :

- a. Dikeluarkan Penetapan Pengadilan tentang dapat atau tidaknya orang tersebut diekstradisi;
- b. Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam pasal 33, Menteri Hukum dan HAM segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden disertai pertimbangan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala kepolisian RI untuk memperoleh keputusan;
- c. Setelah menerima penetapan pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dalam ayat (1), maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisi;
- d. Jika Menteri Hukum dan HAM RI memerlukan tambahan keterangan, maka dapat meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup;
- e. Keputusan Presiden mengenai ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI kepada negara peminta melalui saluran diplomatik;
- f. Kejaksaan Agung RI bersama-sama dengan instansi/ departemen terkait melaksanakan proses penyerahan ekstradisi sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan kepada negara peminta. (Kejaksaan Agung RI, 2009;5).

#### Beberapa Perjanjian Tentang Ekstradisi

Suatu negara akan berhadapan dengan negara yang tidak bersedia menyerahkan orang yang diminta, pada lain pihak akan berhadapan dengan negara yang bersedia menyerahkan orang yang diminta, apabila sebelumnya tidak ada perjanjian ekstradisi dengan negara yang bersangkutan. Untuk mencegah ketidak pastian itu demi terwujudnya kepastian bagi semua pihak, dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian-perjanjian ekstradisi.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya perjanjian ekstradisi ada yang bersifat bilateral

maupun multilateral. Perjanjian ekstradisi yang bilateral biasanya diadakan antara negara-negara dimana frekuensi orang atau pelaku kejahatan yang melarikan diri ke dalam wilayah masing-masing pihak cukup banyak jumlahnya atau antara negara-negara yang secara geografis berdekatan letaknya.

Beberapa contoh perjanjian ekstradisi bilateral adalah :

- a. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia 1974, yang oleh Indonesia telah diratifikasi dan mengundangkannya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1974.
- b. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Philipina 1976, yang oleh Indonesia telah diratifikasikan dan diundangkannya dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1976.
- c. Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Thailand 1978, yang oleh Indonesia diratifikasikan dan diundangkannya dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1978.
- d. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Australia 1994, yang oleh Indonesia diratifikasikan dan diundangkannya dengan Undang-Undang No. 8 tahun 1994.
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Hongkong for The Surrender of Fugitive Offenders*).
- f. Dengan Korea Selatan ditandatangani tahun 2001 belum diratifikasi.
- g. Dengan Singapura ditandatangani tanggal 27 April 2007 belum diratifikasi.

Perjanjian ekstradisi bilateral dapat menjamin suatu kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan saja, sedangkan dengan negara-negara lain dimana belum diadakan perjanjian, masih tetap belum menjamin ada suatu kepastian hukum.

Menurut perjanjian ekstradisi secara bilateral sebenarnya kurang efisien yang dimana setiap negara akan membuat perjanjian terlebih dahulu dengan mengadakan perundingan-perundingan yang memakan waktu yang lama. Sedangkan masalah ekstradisi terkadang melibatkan kepentingan lebih dari dua negara. Dengan pertimbangan efisiensi beberapa negara



terutama negara-negara yang secara geografis berdekatan letaknya atau antar negara yang mempunyai kesamaan sejarah dan idiologis, akan lebih baik kalau perjanjian ekstradisi ini diadakan secara multilateral.

Beberapa contoh perjanjian ekstradisi multilateral adalah :

- a. Perjanjian ekstradisi Liga Arab atau (*The Arab League Extradition Agreement*), tanggal 14 september 1952.
- b. Konvensi ekstradisi Negara-negara Eropa atau (*The European Extradition Convention*), tanggal 13 desember 1957.
- c. Konvensi ekstradisi Negara-negara Benelux antara Belgia, Nederland dan Luxemburg atau (*The Benelux Extradition Convention*), tanggal 27 Juni 1962.

Negara-negara yang sudah terikat dalam perjanjian ekstradisi bilateral masih tetap berlaku dan mengikat secara berdampingan dengan perjanjian ekstradisi multilateral. Hubungan antara perjanjian ekstradisi bilateral dengan multilateral bersifat melengkapi. Bila suatu saat terjadi suatu pertentangan maka perjanjian bilateral yang lebih diutamakan, karena perjanjian bilateral dapat dipandang sebagai *Lex Specialis* dari perjanjian ekstradisi multilateral yang sebagai *Lex Generalis*. (I Wayan Parthiana, 1978, *Beberapa Catatan Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia Malaysia, dan Indonesia-Philipina dan Dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang Ekstradisi Nasional Indonesia*, Paper yang diajukan pada diskusi antar dosen-dosen tetap FH. Unpar).

#### Akibat Hukum Perjanjian Ekstradisi Dalam Hubungan Internasional

Seperti yang telah dijelaskan bahwa ekstradisi merupakan pengejawatan kedaulatan hukum dan kedaulatan negara. Negara yang berdaulat tidak dipaksakan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Salah satu bentuk kerjasama yang diadakan antara negara-negara adalah dalam usaha pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Untuk itu diantara negara-negara telah mengadakan suatu perjanjian bilateral yaitu perjanjian ekstradisi, yang menganut prinsip *pacta sunt servanda* atau adanya kewajiban untuk saling mematuhi isi perjanjian. Hal ini timbul dikarenakan adanya kesepakatan untuk saling membantu.

Di Indonesia Ekstradisi diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1979. Akibat

hukum dari perjanjian ekstradisi tersebut adalah Pemerintah Republik Indonesia bersepakat untuk saling menyerahkan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Dalam usaha pencegahan dan pemberantasan kejahatan ini menimbulkan dampak baik secara politis maupun juridis. Dari segi juridis, dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut merupakan suatu landasan hukum, bahwa sudah adanya keinginan kerjasama untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sedangkan dari segi politis, dapat dilihat dari hubungan baik yang ada untuk saling bekerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Seperti dalam hal penyerahan pelaku kejahatan berdasarkan prinsip timbal balik, yang dimana antara negara yang satu dengan negara yang lainnya belum mempunyai perjanjian ekstradisi.

Ekstradisi diantara negara-negara selama ini belum terdapat hal-hal yang menimbulkan dampak negatif, tetapi ada kalanya menimbulkan sensitivitas hubungan diplomatik antara kedua negara yang terlibat dalam pelaksanaan ekstradisi tersebut. (Romli Atmasasmita, 2000;25). Dengan adanya perjanjian ekstradisi negara asing yang merasa berhak untuk menuntut seseorang yang berada di negara Indonesia dapat melakukan haknya, demikian sebaliknya. (Sudarto, 1989;75). Namun diharapkan hubungan baik antara negara-negara yang mengadakan perjanjian ekstradisi dapat terus terjalin sehingga dapat meningkatkan hubungan kerjasama dalam mencegah dan memberantas kejahatan.

#### Prosedur Pelaksanaan Ekstradisi Di Indonesia

*Harus Ada Permintaan Tertulis yang Disampaikan Melalui Saluran Diplomatik.*

Dalam penerimaan permintaan ekstradisi dari negara peminta, yang penting diperhatikan adalah prosedur pengajuan permintaannya, persyaratan yang harus dipenuhi, dan sudah ada perjanjian ekstradisi dengan negara peminta. Yang mana negara peminta sebelum mengajukan permintaan ekstradisi secara resmi terhadap negara yang diminta, orang yang diminta tersebut terlebih dahulu ditahan sementara oleh negara yang diminta untuk keamanan. Adapun tujuan penahanan (*provisional arrest*) ini adalah agar orang yang bersangkutan tidak melarikan diri ke negara lain sampai diajukan ekstradisi.



Negara yang diminta setelah menerima permintaan untuk melakukan penangkapan dan penahanan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah penangkapan dan penahanan tersebut dapat dilakukan atau tidak. Permintaan penangkapan dan penahanan diatur pasal 18, 19, dan 37 UU No. 1 tahun 1979.

Penangkapan dan penahanan seseorang pada umumnya berdasarkan KUHAP. Pada waktu dilakukannya penangkapan, dan tindakan lain, antara lain mengecek identitas dan dokumen yang dimiliki, seperti: paspor, KTP/SIM, sidik jari, dan pengakuan. Dan kemudian dicocokkan dengan foto, sidik jari, dan informasi yang diperoleh dari negara peminta, selanjutnya baru dapat dilakukannya penahanan sementara. Penahanan terhadap pelaku tersebut, harus segera diinformasikan negara peminta melalui NCB-Interpol atau melalui Kedutaan Besar, dan diminta segera mengajukan permintaan ekstradisi.

Agar orang yang diminta tidak ditahan berlarut-larut, sampai melebihi batas waktu yang diperkenankan oleh hukum Indonesia. Negara peminta di dalam mengajukan permintaan untuk menahan harus disertai dengan suatu penegasan bahwa dokumen-dokumen serta persyaratan lain untuk mengajukan permintaan ekstradisi sudah siap atau tersedia, dan dalam secepatnya akan menyampaikan ekstradisi. Dengan suatu penegasan dapat lebih meyakinkan pihak Indonesia, bahwa negara peminta benar-benar akan mengajukan permintaan ekstradisi.

Dalam hal ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 2 UU No. 1 tahun 1979, menyatakan "Dalam permintaan untuk penahanan itu negara peminta harus menerangkan bahwa dokumen sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 sudah tersedia dan bahwa negara tersebut segera dalam pasal 22 sudah tersedia untuk menyampaikan permintaan ekstradisi kepada negara peminta".

Selanjutnya pasal 19 ayat (1) diatur tentang prosedur yang harus ditempuh oleh negara peminta dalam menyampaikan permintaan permohonan tersebut, permintaan penahanan disampaikan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta kepada Kepala Kepolisian RI atau kepada Jaksa Agung RI melalui Interpol Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau dengan telegram. Permintaan penahanan tersebut dapat disampaikan kepada: Kepala Kepolisian RI dan Jaksa Agung RI.

Sedangkan saluran yang harus dilalui adalah: Melalui Interpol Indonesia dan melalui saluran diplomatik.

Setelah surat permintaan untuk menahan itu diterima oleh Kepala Kepolisian atau jaksa agung, dan setelah dipertimbangkan ternyata permintaan penahanan itu dapat dikabulkan, maka pejabat yang berwenang atau Jaksa Agung atau Kepala Kepolisian RI mengeluarkan surat perintah untuk menangkap dan/atau menahan orang yang bersangkutan. Semua itu dilakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam hukum Acara Pidana Indonesia. Ini sesuai dengan *adegium "Lex specialis derogate lex generalis"*.

Penyimpangan dari hukum Acara Pidana Indonesia tercantum dalam pasal 19 ayat (3), yaitu "Menyimpang dari ketentuan Hukum Acara Pidana Indonesia yang berlaku, maka terhadap mereka yang melakukan kejahatan yang dapat diekstradisikan berdasarkan Undang-undang ini dapat dilakukan penahanan".

Dalam perjanjian ekstradisi senantiasa ditentukan batas waktu pengajuan permintaan ekstradisi, seperti dalam perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Australia, Hongkong dan Korea selatan batas waktunya ditentukan 45 hari. Sedangkan dengan Malaysia, Philipina, dan Thailand, batas waktunya ditentukan hanya 20 hari. Bilamana batas waktu permintaan ekstradisi tersebut, tidak dipenuhi maka berakibat pada orang yang diminta ekstradisi tersebut harus dibebaskan.

Perpanjangan penahanan sementara dapat dilakukan setiap 30 hari. Permintaan perpanjangan penahanan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri. Perjanjian ekstradisi dengan negara peminta, seperti Malaysia, Philipina, dan Thailand batas waktu permintaan ekstradisi, harus sudah diterima dalam waktu 20 hari, sedangkan dalam perjanjian ekstradisi dengan Australia, Hongkong, Korea Selatan, dan Singapura, sudah harus diterima dalam waktu 45 hari terhitung mulai dilakukannya penahanan. setelah permintaan ekstradisi diterima, permintaan perpanjangan penahanan, dilakukan selama masih proses hukum, atau dalam proses pengambilan keputusan untuk pelaksanaan penyerahan.

Permintaan ekstradisi kepada Indonesia, diatur dalam pasal 22,23,24 UU No.1 tahun 1979. Permintaan ekstradisi kepada Indonesia ditujukan kepada Menteri Hukum dan Ham, dan disampaikan melalui saluran diplomatik.



Negara peminta dapat juga menyampaikan permintaan ekstradisi, melalui Departemen Luar Negeri cq. KBRI setempat. Setelah permohonan permintaan ekstradisi ini diterima, selanjutnya dipelajari dan diteliti oleh Departemen Hukum dan HAM. Jika persyaratannya dianggap masih belum lengkap, dapat diminta kelengkapan berkas tersebut kepada Negara Peminta, dan ditentukan tentang lama waktunya. Di samping itu juga harus diperiksa mengenai adanya perjanjian ekstradisi antara kedua negara.

Apabila belum ada perjanjian ekstradisi, maka Menteri Hukum dan HAM harus menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Presiden RI. Bilamana Presiden menyetujui maka selanjutnya diproses lebih lanjut. Demikian pula, bilamana tidak ada persetujuan dari Presiden, maka permintaan tersebut ditolak dan dikirimkan kepada negara peminta melalui Menteri Hukum dan HAM. Apabila langkah-langkah tersebut sudah dipenuhi selanjutnya berkas ekstradisi tersebut dikirimkan kepada Kapolri.

Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum (Polri, Kejaksaan Agung, Pengadilan) terhadap orang yang dikenakan ekstradisi dan dilengkapi dengan berkas permintaan ekstradisi, serta barang bukti yang disita. Semua tindakan hukum yang dilakukan dalam proses ekstradisi harus berdasarkan ketentuan hukum Indonesia.

Sesuai pasal 22 ayat (2) UU No.1 tahun 1979 maka surat permintaan harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik, dengan mencantumkan pernyataan tentang:

- Kewenangan pejabat yang mengajukan permintaan sesuai hukum nasionalnya;
- Dasar pengajuan permintaan ekstradisi (perjanjian, jaminan resiprokla, atau hubungan baik);
- Tujuan ekstradisi dimintakan;
- Ringkasan uraian kasus;
- Kejahatan yang menyebabkan seseorang harus diekstradisi;
- Pejabat penghubung;
- Pernyataan urgensi dan kerahasiaan.

Sesuai pasal 22 ayat (3) UU No.1 tahun 1979 permintaan ekstradisi untuk tujuan agar orang tersebut menjalani hukuman di negara peminta, harus melampirkan:

- Lembaran asli atau salinan otentik dari putusan pengadilan yang berupa putusan

yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

- Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dan kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
- Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta.

Pasal 22 ayat (4) UU No.1 tahun 1979 surat permintaan ekstradisi untuk tersangka dengan tujuan agar orang tersebut menjalani proses hukum di negara peminta, harus melampirkan:

- Lembaran asli atau salinan otentik dari surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara peminta;
- Uraian dari kejahatan yang dimintakan ekstradisi dengan menyebutkan waktu dan tempat kejahatan dilakukan dengan disertai bukti tertulis yang diperlukan;
- Teks ketentuan hukum dari negara peminta yang dilanggar atau jika hal demikian tidak mungkin isi dari hukum yang diterapkan;
- Keterangan-keterangan saksi di bawah sumpah mengenai pengetahuannya tentang kejahatan yang dilakukan;
- Keterangan yang diperlukan untuk menetapkan identitas dari kewarganegaraan orang yang dimintakan ekstradisinya;
- Permohonan penyitaan barang-barang bukti bila ada dan diperlukan.

*Jawaban Tertulis dari Negara Diminta Kepada Negara Peminta Yang Harus Disampaikan Melalui Saluran Diplomatik*

Dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979, ditegaskan setelah Presiden menerima penetapan Pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam ayat (1), maka presiden memberikan keputusan tentang dapat atau tidaknya orang yang diminta itu diekstradisikan.

Di dalam ayat (3) ditegaskan bahwa jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman R.I memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman R.I meminta keterangan yang dimaksud kepada negara-peminta dalam waktu yang dianggap cukup. Mengenai berapa lama waktu yang



dianggap cukup tersebut, didasarkan pada pertimbangan jarak serta luasnya negara yang meminta ekstradisi. Misalnya, jika negara-peminta tersebut di benua Eropa haruslah diberikan batas waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara, di dalam melengkapi permintaan tersebut.

Keputusan terakhir mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan ekstradisi negara-peminta itu terletak di tangan presiden, setelah menerima penetapan Pengadilan serta pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian R.I Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi itu diberitahukan atau disampaikan oleh Menteri Kehakiman R.I kepada negara-peminta melalui saluran diplomatik (pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979).

Jika permintaan negara-peminta dikabulkan oleh negara-diminta dan sudah dilakukan pemberitahuannya secara tertulis kepada negara-peminta yang biasanya pemberitahuan itu disertai pula dengan penentuan mengenai tempat dan waktu dilakukan penyerah-terimaannya, maka selanjutnya dilakukanlah proses penyerah-terimaan orang yang diminta tersebut oleh pejabat yang berwenang dari negara diminta kepada pejabat yang berwenang dari negara-peminta.

Mengenai tempat penyerah terimaan, ditentukan sebelumnya oleh negara diminta, yaitu di suatu tempat atau di wilayah negara diminta itu sendiri. meskipun boleh juga dilakukan di suatu tempat di wilayah negara ketiga, namun harus ada persetujuan dari negara ketiga yang bersangkutan.

Negara peminta setelah menerima pemberitahuan dari negara diminta tentang dikabulkannya permintaan untuk pengekstradisiannya, dalam jangka waktu yang dipandang layak, harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada negara diminta mengenai rencana pengambilan orang yang diminta atau yang akan diekstradisikan. Surat tersebut, antara lain berisi: nama dan identitas dari pejabatnya yang berwenang yang akan menerima penyerah terimaan orang yang bersangkutan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang terkait dengan pengekstradisiannya tersebut kalau memang dibutuhkan. (I Wayan Parthiana, 2002;156).

Pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan oleh negara-diminta, dilakukanlah

penyerah terimaan orang yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang dari negara-diminta kepada pejabat yang berwenang dari negara-diminta kepada pejabat yang berwenang dari negara-peminta pada suatu dokumen berita acara serah terima yang otentik yang sebelumnya sudah disiapkan oleh negara yang diminta. (I Wayan Parthiana, 2005;259).

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

Akibat hukum perjanjian ekstradisi di Indonesia dalam hubungan internasional yang dimana mempererat suatu hubungan, khususnya perjanjian ekstradisi bilateral, dan berdampak baik secara politis maupun juridis. Dari segi juridis, dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut merupakan landasan hukum, bahwa sudah adanya keinginan kerjasama untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sedangkan dari segi politis, dilihat dari hubungan baik yang ada untuk saling bekerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Bahwa prosedur pelaksanaan ekstradisi di Indonesia dengan mengajukan permohonan dari negara peminta (negara asing) kepada negara diminta (Indonesia) melalui saluran diplomatik untuk permintaan penyerahan terhadap seorang pelaku kejahatan pidana. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Negara diminta (Indonesia), apakah permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan UU ekstradisi Indonesia. Apabila tidak sesuai maka permohonan tersebut ditolak, dan apabila permohonan tersebut sesuai maka permohonan tersebut diterima (dalam hal ini diputuskan oleh Presiden RI), kemudian dilakukan suatu penetapan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan ekstradisi oleh Indonesia melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk selanjutnya penetapan disampaikan kepada negara peminta ekstradisi (negara asing) melalui saluran diplomatik.

## Saran

Adapun saran yang dapat dibuat antara lain :

Oleh karena perjanjian ekstradisi lebih menjamin kepastian hukum, maka bagi Negara-negara yang saling mempunyai hubungan baik harus semakin mempererat hubungannya dengan mengadakan perjanjian ekstradisi, terutama dalam hal perjanjian ekstradisi secara



dianggap cukup tersebut, didasarkan pada pertimbangan jarak serta luasnya negara yang meminta ekstradisi. Misalnya, jika negara-peminta tersebut di benua Eropa haruslah diberikan batas waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan kawasan Asia Tenggara, di dalam melengkapi permintaan tersebut.

Keputusan terakhir mengenai dikabulkan atau ditolaknya permintaan ekstradisi negara-peminta itu terletak di tangan presiden, setelah menerima penetapan Pengadilan serta pertimbangan-pertimbangan dari Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian R.I Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi itu diberitahukan atau disampaikan oleh Menteri Kehakiman R.I kepada negara-peminta melalui saluran diplomatik (pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979).

Jika permintaan negara-peminta dikabulkan oleh negara-diminta dan sudah dilakukan pemberitahuannya secara tertulis kepada negara-peminta yang biasanya pemberitahuan itu disertai pula dengan penentuan mengenai tempat dan waktu dilakukan penyerah-terimaannya, maka selanjutnya dilakukanlah proses penyerah-terimaan orang yang diminta tersebut oleh pejabat yang berwenang dari negara diminta kepada pejabat yang berwenang dari negara-peminta.

Mengenai tempat penyerah terimaan, ditentukan sebelumnya oleh negara diminta, yaitu di suatu tempat atau di wilayah negara diminta itu sendiri. meskipun boleh juga dilakukan di suatu tempat di wilayah negara ketiga, namun harus ada persetujuan dari negara ketiga yang bersangkutan.

Negara peminta setelah menerima pemberitahuan dari negara diminta tentang dikabulkannya permintaan untuk pengekstradisiannya, dalam jangka waktu yang dipandang layak, harus menyampaikan surat pemberitahuan kepada negara diminta mengenai rencana pengambilan orang yang diminta atau yang akan diekstradisikan. Surat tersebut, antara lain berisi: nama dan identitas dari pejabatnya yang berwenang yang akan menerima penyerah terimaan orang yang bersangkutan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang terkait dengan pengekstradisiannya tersebut kalau memang dibutuhkan. (I Wayan Parthiana, 2002;156).

Pada waktu dan tempat yang sudah ditetapkan oleh negara-diminta, dilakukanlah

penyerah terimaan orang yang bersangkutan oleh pejabat yang berwenang dari negara-diminta kepada pejabat yang berwenang dari negara-diminta kepada pejabat yang berwenang dari negara-peminta pada suatu dokumen berita acara serah terima yang otentik yang sebelumnya sudah disiapkan oleh negara yang diminta. (I Wayan Parthiana, 2005;259).

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut :

Akibat hukum perjanjian ekstradisi di Indonesia dalam hubungan internasional yang dimana mempererat suatu hubungan, khususnya perjanjian ekstradisi bilateral, dan berdampak baik secara politis maupun juridis. Dari segi juridis, dengan adanya perjanjian ekstradisi tersebut merupakan landasan hukum, bahwa sudah adanya keinginan kerjasama untuk pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Sedangkan dari segi politis, dilihat dari hubungan baik yang ada untuk saling bekerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Bahwa prosedur pelaksanaan ekstradisi di Indonesia dengan mengajukan permohonan dari negara peminta (negara asing) kepada negara diminta (Indonesia) melalui saluran diplomatik untuk permintaan penyerahan terhadap seorang pelaku kejahatan pidana. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Negara diminta (Indonesia), apakah permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan UU ekstradisi Indonesia. Apabila tidak sesuai maka permohonan tersebut ditolak, dan apabila permohonan tersebut sesuai maka permohonan tersebut diterima (dalam hal ini diputuskan oleh Presiden RI), kemudian dilakukan suatu penetapan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan ekstradisi oleh Indonesia melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk selanjutnya penetapan disampaikan kepada negara peminta ekstradisi (negara asing) melalui saluran diplomatik.

## Saran

Adapun saran yang dapat dibuat antara lain :

Oleh karena perjanjian ekstradisi lebih menjamin kepastian hukum, maka bagi Negara-negara yang saling mempunyai hubungan baik harus semakin mempererat hubungannya dengan mengadakan perjanjian ekstradisi, terutama dalam hal perjanjian ekstradisi secara



multilateral. Maka negara-negara yang telah saling sepakat untuk mengadakan perjanjian ekstradisi sebaiknya lebih berusaha dalam meningkatkan peranan ekstradisi sebagai sarana yang ampuh untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Akibat hukum dalam pelaksanaan ekstradisi oleh Indonesia sebagai suatu negara, sebaiknya Indonesia berusaha agar menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain (luar negeri) dapat lebih baik.

#### DAFTAR BACAAN

- Arthur Nussabaum, 1969, *Sejarah Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Budiarto, 1981, *Ekstradisi Dalam Hukum Nasional*, Galih Indonesia, Jakarta.
- I Wayan Parthiana, 1978, *Beberapa Catatan Tentang Perjanjian Ekstradisi Indonesia Malaysia, dan Indonesia-Philipina dan Dalam Rangka Pembentukan Undang-Undang Ekstradisi Nasional Indonesia*, Paper yang diajukan pada diskusi antar dosen-dosen tetap FH. Unpar
- \_\_\_\_\_, 1990, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian I*, Mandar Maju, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian II*, Mandar Maju, Bandung.
- John O'Brien, 2001, *Internasional Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain.
- Kejaksaan Agung RI, 2009, *Buku Panduan Penanganan Perkara Ekstradisi*.
- Melda Kamil Ariondo, 2007, *Hukum Internasional : Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta.
- M. Budiarto, 1980, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan Atas Hak-hak Asasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Oppenheim, 1995, *International Law*, Langmans Green and Co, London.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Strake, 1984, *Pengantar Hukum Internasional II*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Subagio, 1979, *Aneka Masalah Tata Negara R.I*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1989, *Hukum Pidana*, Percetakan Yayasan UNDIP, Semarang.
- Syamsudin Managa Sinaga, makalah "Efektivitas UU No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dalam Praktek" yang disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Kebijakan Nasional tentang Kebijakan Nasional Dalam Pembentukan Perjanjian Ekstradisi Asean, pada tanggal 21-22 Mei 2007.
- The Pocket Macquarie Dictaurus, 1991, *The Macquarie Library, Australia*.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi
- <http://hukum012.blogspot.com/2009/10/hukum-pidana-transnasional.html>



# SUBAK DALAM PRESPEKTIF TATA HUKUM INDONESIA

(SUBAK IN PERSPECTIVE OF INDONESIAN LEGAL SYSTEM)

I Ketut Kasta Arya Wijaya, Ni Made Puspasutari Ujianti

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar  
Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkal Denpasar  
Telp. (0361) 223858 (Hunting) 7449633, Fax (0361) 263902  
E-mail: kastaaryawijaya@gmail.com

## ABSTRAK

Subak merupakan salah satu aset kelembagaan tradisional yang telah terbukti efektifitasnya dalam menyangga pembangunan pertanian dan pedesaan di Bali, kemudian dalam perkembangannya tahun 2012 bulan April Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan dan Budaya (UNESCO) mensahkan budaya Subak sebagai bagian dari warisan dunia pada Sidang ke-36 di St.Petersburg, UNESCO menilai subak sebagai sistem irigasi yang dapat mempertahankan budaya asli masyarakat Bali. Persoalan hukum yang mendasar berkenaan dengan organisasi subak sebagai suatu badan yang otonom atau yang lebih tepat disebut sebagai suatu masyarakat hukum adat adalah menyangkut eksistensinya sebagai suatu badan hukum tradisional baik dalam hubungan ke dalam (intern) dengan warganya maupun keluar (ekstern) yaitu dengan pihak luar baik perorangan maupun lembaga. Untuk meningkatkan eksistensi subak yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya secara positif terutama dalam mengatur anggota (*krama*) dan wilayah (*palemahan*) secara intern maupun dalam membantu program-program pemerintah dibidang pembangunan, maka pengakuan dan penghormatan dapat diatur dengan peraturan seperti Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maupun Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak. Namun sebagai badan hukum privat tampaknya masih memerlukan kelengkapan-kelengkapan tersendiri, sehingga dapat diterima dalam lalu lintas hukum keperdataan.

**Kata Kunci :** Subak, Badan Hukum Otonom, Eksistensi

## ABSTRACT

*Subak is one of the traditional institutional assets of which effectiveness has been proven in supporting agricultural development and rural area in Bali, then in its development, in April 2012, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) ratified the culture of Subak as part of world heritage in the 36<sup>th</sup> Meeting at St. Petersburg, UNESCO assess that Subak is an irrigation system that can maintain the original culture of the Balinese people. The fundamental legal issues related to Subak organization as an autonomous body or more accurately described as an traditional law society involve its existence as a traditional legal entity both in internal relationship with its citizens and external relationship with outsiders both individuals as well as institutions. To improve the existence of Subak of which benefit has been positively perceived especially in organizing members (*krama*) and region (*palemahan*) internally as well as to support the government programs in the field of development, the recognition and respect can be regulated by rules such as Law No. 7 of 2004 on Water Resources as well as Local Regulations of Bali Province No. 9 of 2012 on Subak. However, as a private legal entity, it seems it still requires completion of its own, so it can be accepted in a civil traffic law.*

**Keywords:** Subak, Autonomous Legal Entity, Existence



## PENDAHULUAN

Subak merupakan salah satu aset kelembagaan tradisional yang telah terbukti efektifitasnya dalam menyangga pembangunan pertanian dan pedesaan di Bali. Pada awalnya, kajian subak lebih banyak dilakukan oleh ahli-ahli barat seperti ; *Liefrink, Covarrubias, Geder, Birkelbach, Geertz dan Lanzing*.

Subak merupakan suatu sistem irigasi di Bali yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, namun demikian belum dapat diketahui dengan pasti tentang kapan dan bagaimana subak pertama kali dibentuk dalam artikelnya berjudul *hek Soebak Wezen in het Landscap djembrana* yang diterjemahkan oleh *JL. Swellengrebel* yang menyatakan bahwa selain sebagai suatu sistem irigasi yang baik, subak juga sangat efektif digunakan untuk memunggut pajak pertanian ( *landrente* ). keberadaan Subak dengan sistem irigasinya tersebut sebagai sesuatu yang unik yang dimiliki oleh Bali telah menarik perhatian dunia sejak dahulu baik dari kalangan teoritis maupun praktis (*Sutawan dkk, 1992*).

Dalam perkembangannya tahun 2012 bulan April Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan dan Budaya (UNESCO) mensahkan budaya Subak sebagai bagian dari warisan dunia pada Sidang ke-36 di St.Petersburg, UNESCO menilai subak sebagai sistem irigasi yang dapat mempertahankan budaya asli masyarakat Bali.

Persoalan hukum yang mendasar berkenaan dengan organisasi subak sebagai suatu badan yang otonom atau yang lebih tepat disebut sebagai suatu masyarakat hukum adat adalah menyangkut eksistensinya sebagai suatu badan hukum tradisional baik dalam hubungan ke dalam ( *intern* ) dengan warganya maupun keluar ( *ekstern* ) yaitu dengan pihak luar baik perorangan maupun lembaga.

Persoalan hukum lainnya adalah berkenaan dengan keberadaan hukum dalam kehidupan subak itu sendiri, yang tidak menyangkut hukum yang bersifat formal ( baik yang tertuang dalam *awig-awig* subak sebagai bagian dari hukum adat, maupun dalam ketentuan hukum yang sifatnya informal di antara orang-orang yang terkait dengan kehidupan subak yang terbentuk melalui proses interaksi diantara mereka.

Dilihat dari sisi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan irigasi khususnya dan pengairan pada umumnya, dapat dilihat adanya pemberian peluang kepada

lembaga kemasyarakatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, maka permasalahannya adalah *Bagaimana keberadaan sistem hukum adat yang berlaku dalam pengaturan irigasi tradisional (subak) dengan masuknya sistem hukum nasional dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukannya ?*

## PEMBAHASAN

### Subak Sebagai Persekutuan Hukum Adat

Keberadaan subak sebagai badan hukum tradisional dapat dipahami dalam kedudukannya sebagai suatu bidang yang mempunyai tujuan tertentu. Melalui badan itu para aktor berinteraksi dalam bidang-bidang sosial tertentu untuk mencapai tujuan, yakni untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya. Peran serta pemerintah dalam bidang irigasi, yang diwujudkan dalam bentuk pembuatan bangunan fisik seperti bendungan/ Dam, maupun saluran yang permanen, mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, atau meningkatkan taraf hidup masyarakat petani.

Namun saat itu masyarakat petani tidak menyadari bahwa intervensi pemerintah dalam hal-hal yang bersifat teknis itu membuat masyarakat petani (organisasi subak) tidak bisa mengembangkan diri dan kreatifitas.

Karakteristik dan substansi dari produk hukum pada saat itu kebijakan pembangunan hukum cenderung diarahkan untuk membangun unifikasi dan kodifikasi hukum nasional sebagai satu-satunya hukum yang berlaku bagi semua warga negara yang berada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum nasional diberlakukan secara seragam ( *legal uniformity* ) bagi semua warga masyarakat diseluruh wilayah negara. Idiologi pembangunan hukum seperti ini dikenal sebagai *the ideology of legal centralism* seperti dikatakan Griffiths ( 1986:12), (Nurjaya, 2001:150). Salah satu karakteristik yang mengedepan dari produk hukum pada masa orde baru adalah bercorak sentralistik begitu juga dalam undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan yang pendekatannya bersifat sektoral. Pola pembangunan hukum seperti itu adalah mengingkari kebinekaan sosial dan budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia yakni kemajemukan budaya, normatif dan pranata-pranata yang hidup dan dianut serta dijalankan oleh masyarakat lokal diseluruh



wilayah Indonesia. Dimasyarakat Adat Bali memiliki sistem hukum sendiri yang disebut *awig-awig*.

Ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan dasar dalam pengaturan organisasi subak tersebut, baik yang menyangkut tata organisasi maupun tata irigasinya. Aturan hukum itulah yang lazim disebut *awig-awig* subak yang biasanya mengambil bentuk tidak tertulis walaupun ada yang tertulis. Pranata-pranata hukum yang hidup dan berlaku didalam masyarakat adat inilah, pemerintah mau mengintervensi dengan memasukkan hukum negara didalamnya, sehingga hak-hak masyarakat adat menjadi berkurang baik dalam penguasaannya maupun dalam pengelolaan aset yang dimilikinya.

Karena itu, pranata-pranata dan mekanisme –mekanisme lokal yang juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat tidak diberi ruang hidup secara proposional dalam sistem hukum nasional. Bahkan tidak jarang pemerintah dalam mencapai tujuan politisnya memanfaatkan Organisasi subak ini dalam memenangkan salah satu calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah..

Hukum sebagai struktur sosial dikatakan bercorak dualistik (A. Giddens, 1986:69) yaitu di satu pihak membatasi tingkah laku manusia dan dipihak lain memberikan kesempatan kepada manusia untuk menetapkan starteginya dalam memenuhi kepentingannya. Bilamana melihat hukum dari segi signifikansi sosialnya, maka haruslah gejala hukum dan gejala sosial diamati bersama-sama (SF. More, 1978: 229).

### Subak Dalam Perundangan-Undangan Di Indonesia

Bertemunya aturan hukum yang berasal dari pemerintah dengan aturan hukum tradisional, tidak hanya menimbulkan kesenjangan mengenai hukum mana yang akan dipilih oleh para aktor atau bagaimana menyelesaikan kontradiksi-kontradiksi yang timbul, namun didalamnya kemungkinan akan timbul situasi yang diciptakan oleh para aktor dalam proses interaksinya, dalam proses interaksi tersebut akan dijumpai proses reproduksi dan transformasi dari norma-norma oleh para aktor ke dalam cara dan hasil yang berbeda-beda menurut tempat dan waktu (FV Benda-Beckmann, 1992:56)

Dalam kaitannya dengan organisasi subak, maka yang patut diketahui adalah norma-

norma yang berlaku dalam organisasi subak dan bagaimana persepsi anggota subak terhadap norma-norma tersebut. Selanjutnya bagaimana proses reproduksi dan transformasi dari norma-norma itu dilaksanakan dalam tingkah laku para aktor adalah tidak bisa dipisahkan dari interaksi diantara para aktor, melalui interaksi itulah muncul situasi-situasi yang mempengaruhi perilaku aktor tersebut.

Apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem, maka didalam sistem hukum itu terdapat tiga komponen (Lawrence M. Friedman:15) yaitu (1) komponen struktural, yang mencakup lembaga-lembaga yang diciptakan oleh sistem tersebut; (2) komponen substantif, mencakup segala keluaran dari sistem hukum itu; dan (3) komponen kultural, yang mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu.

Dalam bidang tata hukum ada beberapa aspek yang dapat dilihat yaitu: 1. *Awig-awig subak (legal norms)*; 2. Pelaksanaan *awig-awig (Law Enforcement)*; 3. Penyelesaian sengketa (*Disputes Resolutions*)

#### *Awig-awig subak*

Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak; Pasal 9 menyebutkan bahwa : (1) Setiap *subak* harus memiliki *awig-awig*; (2) *Awig-awig* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan.

Secara teoritis, subak suatu masyarakat hukum adat atau badan hukum, tradisional memiliki aturan-aturan hukum yang ditetapkannya sendiri yang harus dipatuhi oleh semua warganya. *Awig-awig* disusun menurut pola tertentu, disatu pihak pengaturannya sangat rinci, tetapi pada pihak lain tidak lengkap dan lebih banyak mengarah kepada sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warga. Isi *awig-awig* ini ternyata tidak dikenal oleh warga subak secara keseluruhan, walaupun sudah disebarkan, warga subak lebih mengerti terhadap perarem yang ditetapkan pada waktu *sangkepan* ( rapat anggota ) subak. Hal ini disebabkan karena perarem lebih ringkas dan lebih praktis dalam artian menyentuh kebutuhan pokok mereka dalam hubungannya dengan pertanian.

#### *Pelaksanaan awig-awig (Law enforcement)*

Sebagai suatu aturan maka *awig-awig* atau *pararem* memerlukan pengamanan dalam



pelaksanaanya, pengamanan ini sangat diperlukan untuk menjamin ketertiban dan ketentaraman dalam lingkungan subak tersebut, hal yang paling dirasakan pentingnya untuk diawasi dalam pelaksanaanya adalah menyangkut keamanan air dan pola tanam.

Khususnya dalam hubungan keluar, dalam aspek tata hukum ini dijumpai pula kasus yang menunjukkan ketidakmampuan subak sebagai suatu badan hukum untuk menyelesaikannya, karena persoalan itu terkait dengan desa dan dengan aturan hukum nasional biasanya menyangkut masalah hukum pertanahan.

#### *Penyelesaian sengketa (dispute resolutions)*

Sebagai suatu badan hukum tradisional, subak mempunyai kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di lingkungannya. Proses penyelesaian sengketa di lingkungan subak seperti lazimnya dalam lingkungan lembaga adat di Bali, dilaksanakan melalui paruman subak yang didasari oleh musyawarah.

Subak sebagai suatu badan hukum tradisional tidak mempunyai suatu kekuasaan untuk mengambil tindakan tertentu terhadap orang yang bukan warganya, sehingga masalah yang dihadapinya tidak dapat diselesaikan.

Pada sisi lain dari penyelesaian kasus dapat dilihat adanya pengaruh dari unsur pemerintah terhadap keberadaan subak sebagai satu lembaga yang otonom, secara fungsional persoalan ini dapat dimengerti karena kepala desa juga mempunyai tanggungjawab terhadap keamanan lingkungan /wilayahnya. Namun seharusnya persoalan ini diselesaikan terlebih dahulu secara struktural yaitu melalui pengurus subak disini terlihat bahwa intervensi pemerintah terlalu jauh yang semestinya masalah tersebut masih bisa diselesaikan namun pemerintah dengan kekuasaanya mencampuri masalah intern subak dan anggotanya.

Subak jauh sudah diatur sebelumnya didalam perundang-undangan, ini dapat dilihat dari jaman Hindia Belanda, secara yuridis formal diatur dalam Stb. 1891:91, yang memberikan batasan-batasan dari subak, dalam hukum adat yang didalamnya ada hak dan kewajiban krama ( anggota ) subak dan lebih banyak mengarah kepada sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan warganya, pada UUD 1945 pada landasan konstitusional dan dasar hukum yang sangat kuat, khususnya setelah adanya Amandemen kedua Undang Undang Dasar (UUD) 1945.

Pasal 18B ayat (2) (amandemen) UUD 1945 pada bab VI yang mengatur tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Bab X A yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia pada pasal 28-I Ayat (3) semakin memperkuat kedudukan masyarakat adat dengan mengatakan bahwa: "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban" merupakan hak azasi manusia yang harus dilindungi oleh Negara. Dengan penegasan pasal ini menjadi sangat jelas bahwa apabila satu komunitas masyarakat adat menyatakan dirinya masih hidup (*self-identification and self-claiming*) maka Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melindunginya.

## SIMPULAN

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya Air memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk ikut berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya air dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak yang mengatur hak dan kewajiban, kedudukan dan fungsi subak sebagai organisasi tradisional yang mengayomi kegiatan di bidang pertanian dan pengairan masyarakat adat di Bali. Oleh karena itu dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah positif untuk lebih memberikan makna kepada eksistensi subak sebagai suatu masyarakat hukum adat yang otonom atau sebagai suatu badan hukum yang dapat bertindak ke dalam dan keluar sebagai suatu kesatuan, terutama sekali dalam hubungannya dengan lembaga pemerintah dan ketentuan hukum yang berlaku dalam hubungan ini status subak sebagai badan hukum yang bersifat publik tidak banyak menimbulkan masalah.

Untuk meningkatkan eksistensi *subak* yang selama ini sudah dirasakan manfaatnya secara positif terutama dalam mengatur anggota (*krama*) dan wilayah (*palemahan*) secara intern maupun dalam membantu program-program pemerintah dibidang pembangunan, maka pengakuan dan penghormatan dapat diatur dengan peraturan.



Namun sebagai badan hukum privat tampaknya masih memerlukan kelengkapan-kelengkapan tersendiri, sehingga dapat diterima dalam lalu lintas hukum keperdataan. Sedangkan Pemerintah diharapkan agar tidak terlalu jauh mencampuri urusan intern organisasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang di alami oleh organisasi subak.

#### DAFTAR BACAAN

- Griffiths, Jhon 1986 .*What is legal pluralism*" dalam *jurnal of legal Pluralism and Unffcial No. 2/1986*. The Fondation for journal of Legal Pluralism, The Netherland, PP1-56
- Lawrence M. Friedman, 1984 *The American Law*, New York WW Norton & Company
- SF. More, 1978, *Law as Process, An Antropological Approach*, Routledge & Kegan Paul ltd London.
- Sutawan, 1992 *Strategi Pengembangan Subak Sebagai Lemabga Irigasi Tradisonal Di Bali*, disampaikan dalam rapat senat Terbuka Uiversitas Udayana Pada hari sabtu tanggal 9 mei 1992. Di Denpasar.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 tentang Subak, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9